

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecenderungan perkembangan wilayah di Indonesia dicirikan dengan pertumbuhan penduduk seperti halnya negara-negara berkembang lainnya yang berlangsung dengan sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini memberikan implikasi yaitu meningkatnya tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya [1]. Pertumbuhan penduduk yang terus ada kemudian memicu munculnya berbagai permasalahan perkotaan atau pedesaan terutama terkait menurunnya daya dukung lingkungan dan membentuk sebuah lingkungan permukiman kumuh [3].

Permukiman kumuh adalah kawasan rumah dan kondisi hunian masyarakat mengalami penurunan kualitas hunian dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya [9]. Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena memiliki kepadatan bangunan yang tinggi dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat dan dibangun secara tidak beraturan serta kondisi sarana dan prasarana lingkungannya juga tidak memenuhi syarat [10].

Perkembangan permukiman kumuh biasanya pada kawasan tersebut ditandai adanya permukiman liar (*squatter*). Permukiman liar berbeda dengan permukiman kumuh (*slum*), permukiman liar adalah suatu kawasan ilegal yang dijadikan permukiman oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan permukiman kumuh adalah suatu kawasan yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik, sosial-ekonomi, maupun sosial-budaya dan tidak tercapainya kehidupan yang layak. Permukiman liar mengacu pada legalitas lahan yang dijadikan area permukiman oleh masyarakat, karena lahan yang digunakan bukan miliknya atau digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Maka dari itu semakin banyaknya permukiman liar (*squatter*) di suatu kawasan, potensi menjadi kawasan kumuh pun semakin besar.

Fenomena permukiman kumuh sebenarnya tidak hanya terjadi di perkotaan saja, di beberapa pedesaan di Indonesia masih sering dijumpai kawasan kumuh [2]. Hanya saja, fokus penanganannya lebih dititik beratkan pada daerah perkotaan karena daerah ini memiliki magnet yang lebih tinggi akibat dampak urbanisasi dan lokasi pemerintahan serta menjadi pusat kegiatan pada suatu daerah [3]. Penanganan kawasan permukiman kumuh sesungguhnya perlu dilakukan tidak hanya di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota metropolitan atau kota besar, tetapi juga perlu dilakukan di kawasan-kawasan permukiman kumuh di kota sedang dan kota kecil [4]. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangani kumuh adalah dengan mencegah serta meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat [8].

Peraturan menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebelum maupun setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kembali tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Penanganan kawasan permukiman kumuh sesungguhnya perlu dilakukan tidak saja di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota metropolitan atau kota kota besar, tetapi juga perlu dilakukan di kawasan-kawasan permukiman yang ada di kota sedang maupun kecil atau penyangga. Penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi cukup strategis manakala kawasan tersebut memiliki kaitan langsung dengan bagian-bagian kota metropolitan seperti kawasan pusat kota, kawasan pusat pertumbuhan, maupun kawasan-kawasan lain misalnya kawasan industri, perdagangan, pergudangan, dan perkantoran. Selain memiliki kaitan langsung diduga kawasan permukiman yang terindikasi kumuh di kawasan penyangga memberi andil kesulitan penanganan permukiman kumuh yang ada di kota besar. Untuk itulah perlu dilakukan identifikasi lokasi permukiman terindikasi kumuh di daerah penyangga.

Sasaran identifikasi lokasi kawasan permukiman diutamakan pada kawasan-kawasan *hinterland* kota metropolitan yang ada di daerah penyangga. Meskipun demikian, melalui identifikasi ini sangat memungkinkan untuk ditemukan kawasan-kawasan permukiman kumuh di daerah penyangga yang bukan kawasan *hinterland*. Hal ini mengingat metodologi identifikasi ini tidak membedakan sebaran kawasan permukiman kumuh yang akan ditemukan. Bisa saja lokasi yang ditemukan terletak di pusat kota daerah bersangkutan atau kawasan pedesaan. Untuk itu digunakan kriteria prioritas penanganan yang akan menghasilkan lokasi-lokasi kawasan permukiman kumuh yang berbatasan langsung dengan kawasan-kawasan bagian pusat kota.

Kabupaten Mempawah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 2.797,88 km² yang memiliki kawasan kumuh. Berdasarkan SK Bupati Mempawah Nomor 297 Tahun 2021 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh, tercatat Kabupaten Mempawah memiliki 9 titik sebaran wilayah kumuh. Penetapan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Mempawah berdasarkan 7 kriteria meliputi, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Desa Wajok Hulu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jongkat dengan luas wilayah 50 km² merupakan desa terluas kedua setelah Desa Wajok Hilir dimana belum ditetapkan sebagai lokasi perumahan dan permukiman kumuh. Walaupun belum ditetapkan sebagai lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Mempawah tidak menutup kemungkinan Desa Wajok Hulu lepas dari permasalahan kumuh akibat menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman. Selain itu dalam SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) Kabupaten Mempawah tahun 2017-2021, Desa Wajok Hulu ditetapkan sebagai wilayah prioritas pengembangan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) karena desa ini termasuk dalam wilayah dengan tingkat resiko cukup tinggi. Resiko sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Desa Wajok Hulu dalam RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yakni pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Desa Wajok Hulu yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan berfungsi sebagai pusat pemerintahan lokal, pendidikan skala lokal dan pusat pengumpul/pengolahan skala lokal. Selain itu Desa Wajok Hulu merupakan desa yang jaraknya sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Kota Pontianak yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Mengidentifikasi kondisi awal terkait kumuh menjadi hal yang perlu sebagai bentuk pencegahan dini akan terbentuknya permukiman kumuh baru akibat penambahan penduduk dan mendukung dalam persiapan Desa Wajok Hulu menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Penelitian ini lebih difokuskan pada Dusun Brahima yang merupakan sebagian wilayah Desa Wajok Hulu. Deliniasi dalam mengidentifikasi bisa mengambil sebagian wilayah RT/dusun dan wilayah yang lebih luas yakni Kabupaten/kota. Penelitian difokuskan di Dusun Brahima dimana lokasi tersebut terdapat beberapa masalah terkait penurunan kualitas perumahan permukiman. Permasalahan terkait kumuh di Dusun Brahima ditandai dengan kondisi jalan lingkungan yang rusak dengan konstruksi sebagian jalan berupa tanah dan bebatuan, kondisi drainase yang kurang baik sehingga menimbulkan genangan pada musim penghujan, pengelolaan persampahan yang kurang baik karena tidak ada tersedianya TPS maupun bak sampah sehingga masih banyak warga yang membuang sampah di pekarangan rumah atau langsung membuang sampah diparit dimana parit yang ada merupakan sumber air bersih bagi masyarakat sekitar khususnya dalam kegiatan MCK, selain itu juga sumber air yang tersedia hanya dari air parit dan sumur dengan kualitas air kurang aman. Jika dibandingkan dengan lokasi sekitarnya, untuk permasalahan terkait penurunan kualitas lingkungan tidak jauh berbeda contohnya permasalahan dari kondisi pengelolaan persampahan, drainase maupun air limbah. Namun pada lokasi kajian memang terdapat permasalahan yang lebih kompleks terutama pada kondisi jalan yang rusak parah.

Kegiatan identifikasi tingkat kekumuhan di Dusun Brahima, diharapkan akan diperoleh data dan informasi yang menggambarkan profil permukiman kumuh dan mampu menunjukkan kualitas permukiman dengan 4 klasifikasi tingkat kekumuhan

yaitu bukan permukiman kumuh, permukiman kumuh ringan, permukiman kumuh sedang dan permukiman kumuh berat beserta parameter-parameter penyebab kekumuhan berdasarkan tingkat kualitas permukiman di Dusun Brahima. Adanya isu dan permasalahan diatas perlu adanya kegiatan identifikasi sebagai langkah awal pencegahan dini terbentuknya lokasi permukiman kumuh baru. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Identifikasi Tingkat Kekumuhan Di Dusun Brahima Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat”. Diharapkan dengan penelitian Identifikasi Tingkat Kekumuhan di Desa Wajok Hulu ini bisa menjadi salah satu contoh dan rekomendasi dalam kegiatan identifikasi tingkat kekumuhan di wilayah lainnya yang juga bisa terindikasi kumuh khususnya Kabupaten Mempawah.

1.2 Rumusan Masalah

Dusun Brahima adalah salah satu Dusun yang ada di Desa Wajok Hulu dan letaknya yang strategis karena berdekatan dengan pusat kegiatan perkotaan yaitu Kota Pontianak. Lokasi strategis yang dimiliki tersebut tentu memberikan dampak bagi daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan tersebut terutama dalam hal penambahan penduduk. Perpindahan dan pertumbuhan penduduk yang terus ada dan berkembang kemudian memicu munculnya berbagai permasalahan perkotaan atau pedesaan terutama terkait menurunnya daya dukung lingkungan dan nantinya akan membentuk sebuah lingkungan permukiman kumuh. Permasalahan terkait kumuh di lokasi penelitian ditandai dengan kondisi jalan lingkungan yang rusak dengan konstruksi sebagian jalan berupa tanah dan bebatuan, kondisi drainase yang kurang baik, pengelolaan persampahan yang kurang baik karena tidak ada tersedianya TPS maupun bak sampah sehingga masih banyak warga yang membuang sampah di pekarangan rumah atau langsung membuang sampah diparit dimana parit yang ada merupakan sumber air bersih bagi masyarakat sekitar khususnya dalam kegiatan MCK, dan permasalahan lainnya. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian guna merumuskan arahan yang tepat terkait peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh [12]. Perumusan arahan tersebut langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi karakteristik permukiman kumuh yang terbentuk di masing-masing tingkat kekumuhan yang ada. Maka dari itu rumusan

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana **“Mengidentifikasi Tingkat Kekumuhan di Dusun Brahima Desa Wajok Hulu”**.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi atau gambaran kawasan permukiman kumuh serta mengukur tingkat kekumuhan berdasarkan indikator terkait kekumuhan di Dusun Brahima Desa Wajok Hulu. Adapun sasaran yang ingin ditempuh guna mencapai tujuan adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi kekumuhan di Dusun Brahima Desa Wajok Hulu.
2. Menganalisis klasifikasi tingkat kekumuhan di Dusun Brahima Desa Wajok Hulu.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah merupakan pembatasan wilayah secara geografis, sedangkan ruang lingkup substansi merupakan pembatasan materi yang akan dibahas didalam penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang akan dibahas terletak pada kawasan permukiman di Dusun Brahima dengan fokus penelitian di RW 12 yakni RT 01-RT 04 dengan luas 7,40 Ha. Lokasi penelitian yang hanya mengambil 1 RW 4 RT karena untuk deliniasi bisa diambil dari sebagian wilayah RT/dusun dan lokasi dipilih karena terdapat masalah yang terjadi terkait kumuh terutama pada kondisi sarana prasarana. Adanya permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukannya kegiatan pendataan awal atau identifikasi terkait kumuh, dimana untuk proses identifikasi sendiri seharusnya dilakukan disemua wilayah. Selain itu, lokasi penelitian juga merupakan bagian wilayah Desa Wajok Hulu yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak dan jaraknya yang sangat dekat dengan Kabupaten Mempawah, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : RW 04 Dusun Brahima
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Wajok Hulu
- Sebelah Barat : Dusun Simpang Empat
- Sebelah Timur : Dusun Sungai Durian

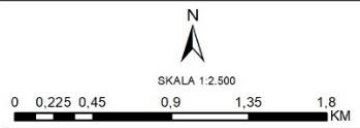


PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA

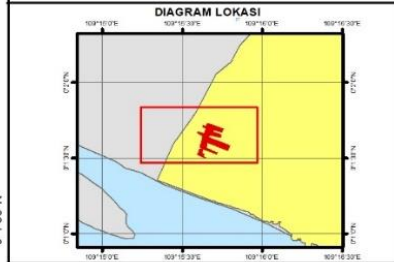
IDENTIFIKASI TINGKAT KECUMUHAN DI DUSUN BRAHIMA
 DESA WAJOK HULU KECAMATAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH

PETA LOKASI KAJIAN

NAMA : LENI KURNIAWATI
 NIM : D1091181026



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



Legenda

Lokasi Penelitian

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. SAS PLANET 2021
 2. RTRW KABUPATEN MEMPAWAH

Kondisi Bangunan



Kondisi



Kondisi Jalan



Kondisi Penyediaan Air



Gambar 1. 2 Kondisi Eksisting Lokasi Penelitian

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Secara substansi, ruang lingkup studi yang dibatasi pada 7 (tujuh) aspek dan 16 kriteria yang menjadi acuan:

1. Identifikasi kondisi kekumuhan di Dusun Brahima Desa Wajok Hulu berdasarkan kondisi bangunan gedung, kondisi lingkungan jalan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran.
2. Analisis tingkat kekumuhan di Dusun Brahima Desa Wajok Hulu berdasarkan aspek kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran yang nantinya akan dilakukan skoring dan diketahui klasifikasi tingkat kekumuhan apakah termasuk bukan kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup substansi, sistematika penulisan dan kerangka pemikiran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang uraian tinjauan pustaka maupun teori-teori yang berkaitan dengan identifikasi tingkat kekumuhan dan penelitian terdahulu yang membahas terkait identifikasi kekumuhan seperti pengertian permukiman, pengertian kumuh, kriteria permukiman kumuh dan teori teori lainnya yang berkaitan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang rangkaian metodologi dalam menunjang pelaksanaan penelitian yang diantaranya mencakup pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel dan indikator, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

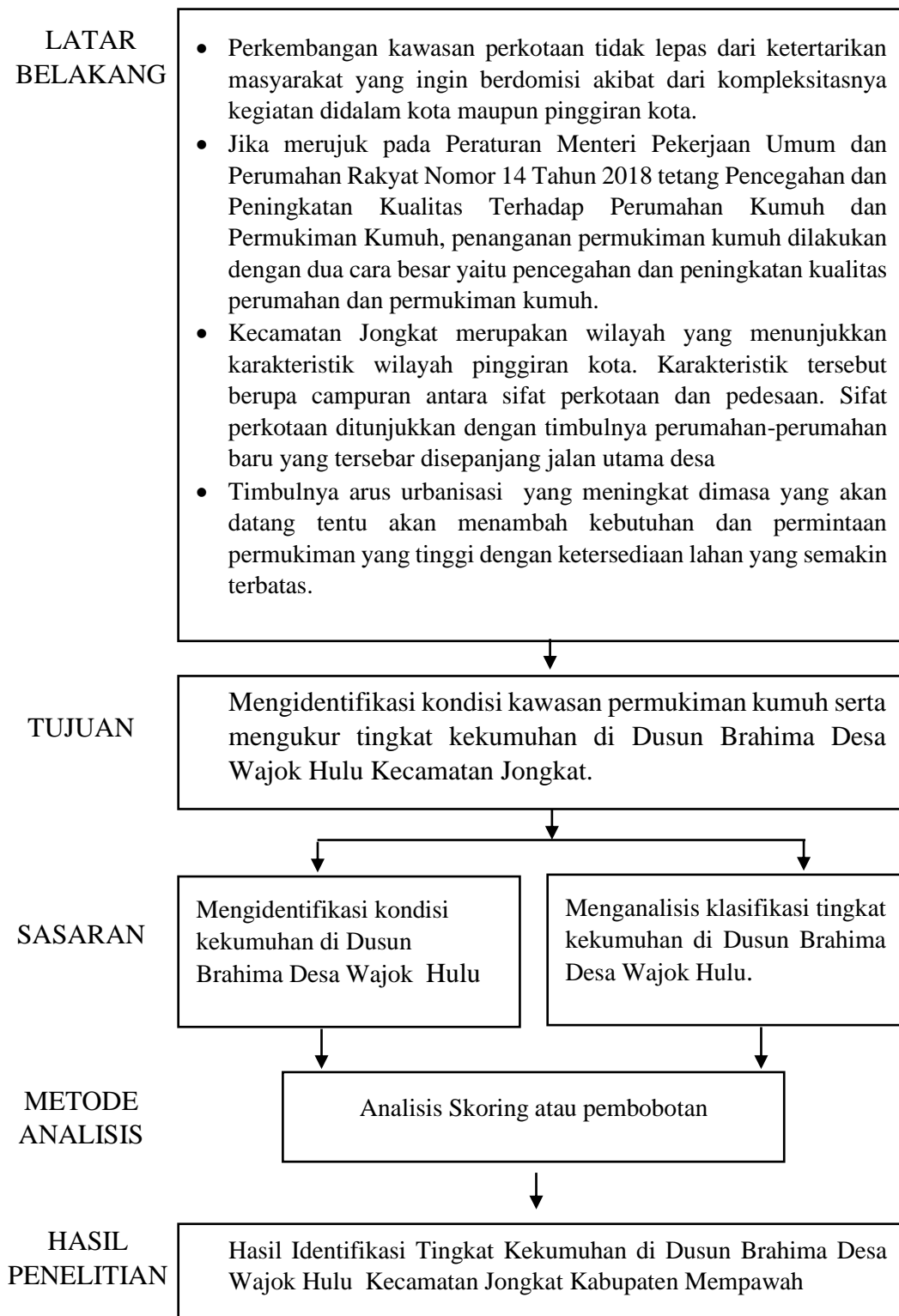
BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisikan analisis dan hasil yang dipaparkan secara lugas yang diperoleh dalam penelitian. Hasil dan analisis yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam menentukan rekomendasi terkait.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan proses penelitian. Selain kesimpulan, didalamnya juga akan dimuat saran atau rekomendasi untuk wilayah penelitian maupun penelitian pada lokasi yang sama dimasa yang akan datang.

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran